

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi sebagai suatu keniscayaan sejarah manusia yang harus dialami, dalam hal ini manusia harus mengikuti pada arus besar globalisasi dan terus mengadakan penyesuaian-penyesuaian terhadap semua perangkat yang selama ini digunakan dengan arus besar tersebut.¹ Pada masa ini tak ada satu pun negara yang bisa menghindarkan diri dari arus globalisasi. Mau tidak mau setiap negara akan masuk dalam pusaran dinamika dunia, baik dinamika budaya, politik, keamanan, termasuk dalam pusaran ekonomi global, hal ini terjadi karena kemajuan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi.² Adanya globalisasi berdampak dengan lahirnya integrasi-integrasi baik yang di latar belakang oleh integrasi organisasi maupun integrasi kawasan. Tidak terkecuali yang berada di kawasan Asia Tenggara, yaitu ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) yang merupakan sebuah organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN adalah organisasi regional tertutup karena keanggotaannya hanya terdiri dari negara-negara yang berada di kawasan Asia

¹ <http://www.asppuk.or.id/index.php/artikel/94-tirani-globalisasi> diakses pada 26/10/2014 pukul 22:10 WIB.

² <http://riaubisnis.com/kadin-riau-umkm-riau-harus-siap-hadapi-asean-economic-community-2015/> diakses pada 26/10/2014 pukul 22:10 WIB.

Tenggara.³ ASEAN berdiri dilatar belakangi oleh ketidak stabilan ekonomi dan persamaan nasib negara-negara Asia Tenggara yang hampir semuanya mengalami penjajahan (kecuali Thailand).

Berdirinya ASEAN bertujuan sebagai badan kerjasama dibidang ekonomi, politik, sosial budaya untuk menciptakan stabilitas dan kedamaian di kawasan Asia Tenggara. ASEAN lahir di Bangkok, Thailand, pada 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok yang diprakarsai oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Sejak awal terbentuknya ASEAN sudah mencerminkan kerjasama regional dari kelima Negara tersebut. Salah satu butir kesepakatan dalam deklarasi Bangkok adalah : “Membentuk suatu landasan kokoh dalam meningkatkan kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara dengan semangat keadilan dan kemitraaan dalam rangka menciptakan perdamaian, kemajuan dan kemakmuran kawasan”⁴ Dengan demikian ASEAN telah memilih *economic road towards peace*, berdasarkan asumsi bahwa jika Negara-negara ASEAN mencapai kemakmuran, maka perdamaian akan terwujud. Pada intinya ASEAN berdiri dengan tujuan bagaimana keamanan yang stabil dalam jangka panjang dapat tercipta di kawasan, baik melalui kerjasama ekonomi, teknologi, sosial budaya maupun kerjasama dalam bidang politik dan

³ Sumaryo Suryokusumo, (1993), “Aspek Hukum Internasional dan Regional ASEAN sehubungan dengan AFTA”, *jurnal Luar Negeri*, No. 24, hlm. 38, dalam skripsi “Tantangan, Hambatan Dan Peluang Indonesia Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015” disusun oleh Fazrin Syahputra HI UMY 2009.

⁴ ASEAN *Document Series* 1967-1985, ASEAN Secretariat, Jakarta, 1985, hal 2, dalam skripsi “Dampak Kemajuan Ekonomi China-India Terhadap Proses Integrasi Ekonomi ASEAN (2000-2008)” yang disusun oleh Haiyyu Darman Moenir HI UI 2010.

keamanan.⁵ Hingga pada akhirnya Negara seperti Brunei (1984), Vietnam (1995), Myanmar (1997), Laos (1997), Kamboja (1999), bertahap ikut bergabung ke dalam ASEAN, hingga saat ini memiliki total 10 negara anggota. ASEAN telah mengalami banyak perkembangan yang lebih integratif dan berwawasan ke depan dengan dibentuknya *ASEAN Community* (Komunitas ASEAN) yang dilandasi oleh disahkannya *ASEAN Charter* (Piagam ASEAN) pada KTT ASEAN di Singapura, 20 November 2007, yang secara khusus akan menjadi landasan hukum dan landasan jati diri ASEAN ke depannya. Awal mula terbentuknya *ASEAN Community* diawali pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN tanggal 15 Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia, dengan disepakatinya Visi ASEAN 2020, angka 2020 merupakan batas akhir dari transisi menuju globalisasi ekonomi yang saat itu akan ditandai oleh kebebasan arus barang, jasa dan orang pada skala dunia, kemudian dipertegas lagi pada KTT ASEAN di Bali pada 7-8 Oktober 2003 dengan ditandatanganinya *ASEAN Concord II*, yang menyepakati pembentukan *ASEAN Community* yang bekerjasama dalam bidang Keamanan Politik (*ASEAN Political-Security Community*), Ekonomi (*ASEAN Economic Community*), dan Sosial Budaya (*ASEAN Socio-Cultural Community*).

Kemudian pada KTT ASEAN di Cebu, Filipina, pada Januari 2007, komitmen untuk mewujudkan Komunitas ASEAN dipercepat dari tahun 2020 menjadi tahun 2015 dengan ditandatanganinya "*Cebu Declaration on the Acceleration of the*

⁵ Luhulima, C. P. F., Dewi Fortuna Anwar, Ikrar Nusa Bhakti, Yasmin Sungkar & Ratna Shofi Inayanti (2008). Masyarakat Asia Tenggara Menuju 2015. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 2.

Establishment of an ASEAN Community by 2015".⁶ Tujuan dari pembentukan *ASEAN Community* itu sendiri adalah untuk lebih mempererat integrasi ASEAN dalam menghadapi perkembangan politik internasional, dengan harapan akan lebih memiliki kapabilitas yang lebih baik dalam menyambut era globalisasi.

Gambar 1.1 Tiga Bidang Kerjasama dalam *ASEAN Community*



Sumber Gambar : http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=7911 diakses pada 14/02/2015 pukul 13.28 WIB.

ASEAN menyadari bahwa perlunya menyesuaikan cara pandangnya agar dapat lebih terbuka dalam menghadapi permasalahan-permasalahan internal dan eksternal. Untuk meningkatkan daya saing di pasar dunia serta untuk mendorong pertumbuhan

⁶ http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=7911 diakses pada 03/10/2014 pukul 21:20 WIB.

ekonomi di kawasan regional, seluruh anggota ASEAN sepakat mewujudkan integrasi ekonomi melalui program ASEAN *Economic Community/AEC* (Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA). Adapun faktor- faktor yang mendorong pembentukan AEC⁷.

Dinamika Internal :

1. Potensi pasar yang cukup besar.
2. Pertumbuhan kerjasama ekonomi masih cukup rendah dibandingkan dengan potensi yang dimiliki.
3. Implementasi AFTA, AFAS dan AIA yang masih sangat rendah (30%).

Dinamika Eksternal :

1. Terdapat kecenderungan perubahan lingkungan strategis global yang menuntut negara-negara di dunia untuk senantiasa meningkatkan daya saingnya.
2. Pada tataran regional, terdapat gerakan kearah pengintegrasian kekuatan ekonomi yang berbasis pada pasar tunggal (*single market*) dan produksi tunggal yang terintegrasi (*simple production*).
3. Munculnya Cina dan India sebagai kekuatan ekonomi dunia yang merubah tatanan perdagangan dunia, khususnya di Asia Timur.

⁷ Badan Pengkajian Kebijakan Deplu RI (2008). Buku "Pertemuan Kelompok Ahli, ASEAN *Economic Community Blueprint* : Tindak Lanjut dan Kesiapan Indonesia menuju 2015". Hal 60 dan 62

Dalam sejarah berjalannya sudah banyak kerjasama yang dilakukan antar negara anggota ASEAN, baik kerjasama di bidang pendidikan, olahraga, keamanan dll. AEC merupakan salah satu perwujudan dari salah satu dari 15 tujuan ASEAN, yaitu: “menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitasi yang efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas; terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh; dan arus modal yang lebih bebas”⁸, dalam hal ini implementasinya mengacu pada *AEC Blueprint/Cetak Biru MEA*. *AEC Blueprint* merupakan suatu *master plan* bagi ASEAN dalam menjalankan AEC 2015 dengan mengidentifikasi langkah-langkah integrasi ekonomi yang akan ditempuh melalui implementasi berbagai komitmen yang rinci, tepat sasaran, dan dengan jangka waktu yang jelas. *AEC Blueprint* memuat empat pilar utama yaitu:⁹

1. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi memiliki lima elemen utama yaitu aliran bebas barang, aliran bebas jasa, aliran bebas investasi, aliran modal yang lebih bebas, serta aliran bebas tenaga kerja terampil. Di samping itu, pasar tunggal berbasis produksi juga mencakup dua komponen penting lainnya, yaitu *Priority Integration Sectors (PIS)* dan kerja sama di bidang pangan, pertanian, dan kehutanan.

⁸ ASEAN Charter Pasal 1 ayat 5.

⁹ AEC Blueprint.

2. ASEAN sebagai kawasan dengan ekonomi yang kompetitif, dengan elemen kebijakan persaingan usaha, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan *e-commerce*.
3. ASEAN sebagai kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan inisiatif integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam).
4. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan pendekatan terpadu terhadap hubungan ekonomi eksternal, dan partisipasi yang meningkat dalam jaringan global.

Dalam AEC sebagai pasar tunggal dan basis produksi terdapat 12 sektor integrasi prioritas yang terdiri dari 7 sektor barang (produk berbasis pertanian, otomotif, elektronik, perikanan, produk berbasis karet, tekstil dan produk berbasis kayu) dan 5 sektor jasa (transportasi udara, e-ASEAN, pelayanan kesehatan, pariwisata dan logistik).¹⁰

Sejak terbentuknya ASEAN, kerjasama dalam bidang keamanan dan ekonomi sudah mendapat peran kunci dalam mencapai stabilitas kawasan. Bahwa pembangunan ekonomi setiap negara anggota merupakan landasan dasar bagi upaya mencapai

¹⁰ *ASEAN Economic Community Blueprint*, <http://www.aseansec.org/21083.pdf> diakses pada 15 Maret 2009, pukul 20:47 WIB, dalam Mantra, Dodi (2011). Hegemoni dan Diskursus Neoliberalisme (Menelusuri Langkah Indonesia Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015). Bekasi Selatan : Mantra Press. Hal 4.

stabilitas, sebagaimana stabilitas pada akhirnya merupakan kunci pembangunan ekonomi berkelanjutan.¹¹ Sebagai salah satu dari tiga pilar utama *ASEAN Community* 2015, AEC yang dibentuk dengan misi menjadikan perekonomian di ASEAN menjadi lebih baik serta mampu bersaing dengan Negara-negara yang perekonomiannya lebih maju dibandingkan dengan kondisi negara ASEAN saat ini. Integrasi ekonomi tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing ASEAN di pasar dunia, serta bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan standar hidup penduduk ASEAN. AEC menjadi pasar tunggal yang di dasari oleh terjadinya produksi tunggal yang berbasis pada arus barang, jasa, tenaga kerja dan arus modal yang lebih bebas diantara negara anggota ASEAN.

Menjelang AEC 2015 yang sudah sepatutnya harus disadari dan diketahui oleh semua elemen masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, namun demikian masih banyak orang yang belum mengetahui mengenai definisi dari AEC itu sendiri. Berangkat dari situasi tersebutlah, menarik dicermati mengenai peranan Koperasi yang notabene merupakan *saka guru* ekonomi Indonesia. Dengan logika sederhana apabila tiang penyangga (*saka*) ekonomi itu tertancap dengan kuat, maka bangunan ekonomi tersebut sudah barang tentu akan menjadi kuat. Telah menjadi keyakinan dari Bung Hatta, Bapak Koperasi Indonesia, bahwasannya bangsa Indonesia hanya dapat mengangkat dirinya dari kemiskinan, dari tekanan hidup dan dari hisapan kaum modal jikalau ekonomi rakyat Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan

¹¹ Luhulima, C. P. F., Dewi Fortuna Anwar, Ikrar Nusa Bhakti, Yasmin Sungkar & Ratna Shofi Inayanti, Op.cit, hal 35-36.

Koperasi.¹² Dengan koperasi yang kegiatannya terletak pada kerjasama, gotong royong dan kekeluargaan, orang akan lebih mengenal diri nya sendiri dan percaya pada kemampuan yang ada pada diri sendiri. Koperasi yang berasaskan kerjasama, gotong royong dan kekeluargaan menumbuhkan rasa setia kawan dan saling tolong menolong. Nilai-nilai tersebut bersumber dari nilai-nilai yang sudah sejak dahulu tumbuh serta berakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Koperasi dikatakan merupakan *saka guru* perekonomian Indonesia karena :¹³

1. Koperasi merupakan wadah penampung pesan politik bangsa terjajah yang miskin ekonominya dan di dominasi oleh sistem ekonomi penjajah. Koperasi menyadarkan kepentingan bersama, menolong diri sendiri secara bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan produktif. Dengan demikian koperasi menjadi penting sebagai organisasi perekonomian rakyat dalam perlawanannya terhadap penindasan sistem modal asing kolonial dan pemerintah kolonial. “ . . . Di bawah penindasan modal raksasa asing, dengan pemerintah asing sebagai pelindung alamiahnya, seperti halnya di Indonesia sekarang ini, dan hanya menimbulkan kesengsaraan dan kemelaratan, maka sistem perekonomian rakyat yang diorganisir secara Koperasi akan dapat melawan dengan

¹² Ninik Widiyanti, Y.W. Sunindhia, S.H. (1992). Koperasi dan Perkenonomian Indonesia. Jakarta : PT RINEKA CIPTA. Hal 211.

¹³ Sri Edi Swasono, Mencari Bentuk, Posisi, dan Realitas Koperasi di dalam Orde Ekonomi Indonesia, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1987.hlm 158-159, dalam Dra. Ninik Widiyanti, Y.W. Sunindhia, S.H. (1992). Koperasi dan Perkenonomian Indonesia. Jakarta : PT RINEKA CIPTA. Hal 212.

berhasil. Koperasi juga bentuk pengorganisasian perekonomian rakyat, yang dapat memberikan dasar-dasar kuat bagi pembangunan kembali ekonomi kita . . .” (Pidato inagurasi Bung Hatta tahun 1926 untuk menjabat Ketua Perhimpunan Indonesia).

2. Koperasi adalah bentuk usaha yang bukan saja menampung, tetapi juga mempertahankan serta memperkuat identitas dan budaya bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa dan kolektivitas akan tumbuh subur di dalam Koperasi. Selanjutnya Koperasi akan lebih terbangun dengan lebih menguatnya budaya itu.
3. Koperasi adalah wadah yang tepat untuk membina golongan ekonomi kecil/pribumi. Dalam hubungan ini Koperasi memupuk kekuatan ekonomi bersama antara yang lemah untuk menghadapi kekuatan-kekuatan besar yang merugikan dan mematikan yang kecil-kecil. Koperasi di sini lebih dari pada memupuk kemandirian dan meningkatkan kemampuan produktif anggota nya melalui swakarsa dan swadaya saja, tetapi terutama memupuk kesadaran ekonomi dan solidaritas.
4. Seperti dikatakan GBHN (Garis Besar Haluan Negara), Koperasi adalah lembaga ekonomi yang berwatak sosial. Sebagai wahana sosial-ekonomi ke *saka guru* an Koperasi bersifat menyeluruh karena Koperasi dapat hidup di dalam bangunan usaha lain yang non-Koperasi. Koperasi dapat hidup pula, baik di dalam bangun usaha swasta, bangun usaha negara, maupun di dalam instansi lain seperti kantor pemerintah.

5. Koperasi adalah wahana yang tepat untuk merealisasikan ekonomi pancasila terutama karena terpenuhinya tuntutan kebersamaan dan asas kebersamaan dan asas kekeluargaan. Dalam keseluruhan koperasi adalah kemakmuran rakyat sentris.

Dengan slogan “Koperasi Indonesia Menuju Ekonomi Global” menarik untuk dipelajari/diteliti secara lebih lanjut, karena Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) merupakan salah satu lembaga/badan usaha yang banyak bersentuhan dengan banyak lapisan masyarakat Indonesia, utamanya masyarakat lapisan menengah ke bawah, dengan kesimpulan bahwa Koperasi dan UKM merupakan tulang punggung perekonomian Negara. Oleh karenanya Koperasi dan UKM lah yang menjadi salah satu ujung tombak bagi Indonesia dalam menghadapi AEC. Terlebih pemberdayaan UKM yang notabene merupakan tulang punggung ekonomi dari negara anggota ASEAN : *Small and medium enterprises (SMEs) including micro-enterprises form the backbone of the economy in ASEAN Member Countries. They are the largest source of domestic employment across all economic sectors, in both rural and urban areas. The SME sector also provides opportunities for women and the young to participate in the economic development of the country.*¹⁴ Pengesahan ASEAN Policy Blueprint for SMEs Development 2004-2014, yang bertujuan untuk

¹⁴ APBSD Blueprint hal 1.

menjamin adanya transformasi UKM ASEAN yang memiliki daya saing, dinamis, dan inovatif. Di Indonesia kriteria dari UKM adalah :¹⁵

- Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil (asset : > 50 juta – 500 juta dan omset : 300 juta – 2,5 milyar)
- Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria (asset : > 500 juta – 10 milyar dan omset : 2,5 milyar – 10 milyar)

Orang Jawa terdahulu menggambarkan kejayaan Nusantara dengan mengatakan *Jayaning Majapahit, kumlèbèté gendéra saka ngisor tekan dhuwur*¹⁶ (*umbul-umbul*), artinya adalah Jayanya Majapahit disaat berkibarnya bendera dari bawah sampai atas. Bendera dari bawah disini diartikan sebagai makmur nya

¹⁵ http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=129 diakses pada 24/09/2014 pukul 10:15 WIB.

¹⁶ Balai Bahasa Yogyakarta (2006). Pedoman Umum Ejaan Bahasa Jawa Huruf Latin yang Disempurnakan. Edisi Revisi : Kanisius.

rakyat kecil, apabila rakyat kecil makmur, sudah tentu rakyat yang diatas nya juga ikut makmur. Kesimpulan nya apabila perekonomian Indonesia ingin maju dan siap menghadapi AEC, maka perkuatlah *saka guru* perekonomian kita, yaitu Koperasi dan UKM. Tingkat keberhasilan Koperasi dan UKM dalam ikut mensukseskan/mempersiapkan sektor ekonomi Indonesia akan menjadi salah satu indikator baik dalam rangka menyambut AEC 2015.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut :

Apa kebijakan Pemerintah Indonesia dalam implementasi *AEC Blueprint* terkait pengembangan sektor Koperasi dan UKM?

C. Kerangka Teori

Dalam membahas *Blueprint ASEAN Dalam Pengembangan UKM Menjelang ASEAN Economic Community 2015*, Studi Kasus : Pengembangan Koperasi dan UKM di Indonesia , teori yang digunakan dalam membahas masalah ini adalah Teori *People Centered Development* :

Teori *People Centered Development* (PCD), menegaskan bahwa manusia membutuhkan suatu pencerahan baru yang dilandasi oleh suatu nilai-nilai : cinta, kasih sayang dan rasa tanggung jawab yang mendalam pada kemanusiaan dan alam. Faktor penting dalam suatu pembangunan bukanlah pertumbuhan, melainkan transformasi pembangunan yang harus menyelesaikan tiga persoalan dasar:¹⁷

1. Keadilan, semua orang di dunia ini harus memperoleh kesempatan untuk bekerja sehingga dia beserta keluarga bisa hidup lebih layak.
2. Kestinambungan sumber daya alam, setiap generasi manusia harus memelihara sumber daya alam untuk kehidupan generasi mendatang.
3. Partisipasi, pembangunan harus memberi kesempatan bagi semua kelompok di masyarakat untuk berpartisipasi menyumbangkan tenaga dan pikirannya.

Dengan acuan ketiga poin tersebut, maka akan menjadi sebuah pembangunan yang berorientasi rakyat. Prinsipnya rakyat harus diberi wewenang lebih dalam menguasai sumber dayanya sendiri, memperoleh akses ke informasi, punya sarana legal untuk menuntut pertanggung jawaban bahkan menuntut penguasa. Para *Agent of Development* harus berjalan mengikuti agenda rakyat. Suatu pembangunan baru terjadi bila masyarakat melakukan usaha pembangunannya sendiri, sehingga proses pembangunan menjadi milik rakyat. Adalah sia-sia apabila pembangunan tidak

¹⁷ David Korten (1993). *Getting to the Twenty First Century: Voluntary Action and The Global Agenda, People Centered Development Forum*. Diterjemahkan: Lilian Tejasudhana. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal xvi.

membangkitkan kapasitas lokal (Koperasi dan UKM). Kebijakan yang menguntungkan produsen kecil/Koperasi/UKM akan berimbang pada suatu yang disebut kemakmuran. Kaitannya dengan tata kelola global, harus ada pembatasan sehingga perhatian ekonomi diseimbangkan dengan prioritas kebijakan publik (keadilan dan kesejahteraan). Menurut penulis, teori PCD ini dapat direlevansikan dengan Koperasi (di dalamnya termasuk UKM) yang merupakan *saka guru* ekonomi Indonesia dan juga merupakan simbol ekonomi kerakyatan. Melalui Teori PCD dapat dikaitkan dengan pokok bahasan pengembangan Koperasi dan UKM Indonesia dalam menghadapi AEC 2015.

Ekonomi dunia adalah suatu sistem dari persaingan antar ekonomi nasional. PCD menolak kehidupan manusia ditentukan oleh kemampuannya bersaing dengan ekonomi bangsa lain (dalam bidang produksi, perdagangan dan jasa). PCD melihat ekonomi dunia yang berfungsi baik adalah yang memiliki berbagai tingkatan otonomi dan terdesentralisasi. Ekonomi tersebut diorganisasikan sedemikian rupa sehingga tiap tingkat memungkinkan tingkat dibawahnya untuk dapat maju pada arah yang memberdayakan manusia dan melestarikan alam. Sistem ekonomi ini harus melibatkan keluarga dan komunitas lokal yang biasanya diabaikan oleh ekonomi modern. Visi PCD memandang keadilan berkelanjutan dan ketercakupan sebagai asas-asas yang menentukan pembangunan. Pembangunan dipandang lebih sebagai gerakan rakyat daripada hanya sebagai proyek pemerintah yang dibiayai modal asing.

Visi PCD mengharapkan pemerintah akan memungkinkan rakyat untuk mengembangkan diri sendiri.¹⁸

D. Hipotesa

Berangkat dari AEC *Blueprint* yang di dalamnya terdapat poin-poin terkait pengembangan UKM di ASEAN, dalam studi kasus pengembangan Koperasi dan UKM di Indonesia, maka dirumuskan hipotesa sebagai berikut :

1. Membuat *website* terkait pengembangan Koperasi dan UKM di Indonesia
2. Mendirikan lembaga terkait pengembangan Koperasi dan UKM di Indonesia
3. Aplikasi konsep OVOP di Indonesia

E. Metode Penelitian

Kajian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu berusaha memberikan gambaran yang memadai mengenai latar belakang dan mempelajari lebih mendalam dengan menggunakan metode penelitian kualitatif atau studi literature. Data yang diperlukan dengan memanfaatkan sumber data sekunder yang diperoleh dari literatur, majalah, jurnal, artikel, data-data dari internet serta laporan maupun tulisan-tulisan yang relevan dengan permasalahan ini. Serta tidak menutup

¹⁸ *Ibid* hal 10.

kemungkinan sumber dari hasil wawancara, percakapan dengan orang-orang yang dianggap cakap dan mampu melengkapi skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan bab yang akan memaparkan mengenai sejarah terbentuknya AEC dan kebijakan UKM dalam AEC.

BAB III : Merupakan bab yang akan memaparkan tentang Koperasi dan UKM di Indonesia.

BAB IV : Merupakan bab yang memaparkan implementasi AEC *Blueprint* terhadap pengembangan Koperasi dan UKM di Indonesia.

BAB V : Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan.